

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia dengan dimensi yang sangat kompleks yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Berbagai Negara dan Lembaga Internasional mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas yang dilakukan hingga saat ini (Suryana, 2014). Dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan berbagai faktor lainnya menjadi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh rakyat. Pentingnya ketahanan pangan, membuat berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan harus komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan bersama dapat dicapai.

Pangan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, Sedangkan Ketahanan Pangan adalah sebagai kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang

cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat (Pangan, 2007).

Berbagai Lembaga Internasional membahas secara mendalam upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti yang dilaksanakan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia, *Asia and the Pacific Economic Cooperation* (APEC) atau Kerja Sama Ekonomi Asia dan Pasifik, *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, berbagai negara juga mengambil inisiatif mendiskusikan isu ketahanan pangan global, seperti pemerintah Jerman menyelenggarakan Konferensi Bonn 2011, (*Federal Ministry for Economic Cooperation and, 2022*) dan akademisi Singapura mengadakan Konferensi Internasional Ketahanan Pangan di Asia (*Nanyang Technological University, 2014*). Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut, ketahanan pangan dibahas secara mendalam, kemudian diambil kesepakatan, sehingga menimbulkan pernyataan yang menunjukkan pemahaman atas permasalahan ketahanan pangan yang terjadi kemudian dumunculkan rekomendasi rancangan penanganannya.

Berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan dengan pemerintah menyelenggarakan peraturan, pembinaan, pengendalian, yang merupakan wilayah interaksi/peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan

lainnya. Kekayaan sumber daya yang memiliki wilayah tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung karena secara sektoral memberikan sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 juga memperkuat dari undang-undang diatas, Bahwa pemerintah daerah berperan dalam memastikan distribusi pangan merata, mengelola cadangan pangan, serta menetapkan lahan pertanian yang berkelanjutan. Pelaku usaha diwajibkan mematuhi standar keamanan pangan, sementara masyarakat berhak memperoleh pangan yang mencukupi dan bergizi. Pengalihan fungsi lahan pangan tanpa izin dilarang, didorong untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Ketahanan pangan dijaga melalui pemantauan stok, pengendalian harga, serta optimalisasi sumber daya pangan daerah .

Kondisi ketahanan pangan yang baik sangat penting hal ini dikarenakan setiap orang membutuhkan akses memadai terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi dan melakukan keberlangsungan kehidupan. Ketahanan pangan sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial masyarakat (Laode Wado et al., 2019). Ketika masyarakat tidak memiliki ketahanan pangan yang baik maka akan memunculkan masalah lain, mereka akan lebih rentan mengalami masalah kesehatan sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap stabilitas ekonomi

secara nasional, dimana masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan yang lemah maka akan menurunkan tingkat produktivitas sehingga dalam konteks yang lebih luas membuat kerusuhan sosial dan ketidakstabilan sosial dan perekonomian.

Ketahanan pangan menjadi sangat penting bagi berbagai negara, terutama bagi negara yang mempunyai penduduk sangat banyak seperti Indonesia dimana dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan 270 juta jiwa pada Tahun 2025 isu tentang ketahanan pangan secara berkelanjutan menjadi sangat penting (Suryana, 2014). Dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan mencakup empat dimensi, yaitu: Ketersediaan pangan; Jangkauan penduduk terhadap pangan; Stabilitas pasokan dan cadangan pangan dan, Pemanfaatan pangan (lazimnya berkaitan dengan budaya pemanfaatan bahan pangan).

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJM 2020-2024 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan

daerah di Provinsi Jambi tahun 2021-2026 akan diprioritaskan pada Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan food estate. Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan ketahanan pangan, serta kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan ketahanan pangan periode 2021-2026.

Badan Ketahanan Pangan Nasional menyatakan dan mengakui bahwa Provinsi Jambi mengalami angka yang baik presentasinya tapi masih perlu perencanaan terus-menerus agar lebih maksimal, penurunan indeks ketahanan pangannya masih harus menghadapi masalah terutama permasalahan rasio konsumsi lebih tinggi dibandingkan produksinya (Badan Pangan Nasional, 2024). Hal tersebut merupakan indikator dini yang mampu menggambarkan derajat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pangsa pengeluaran pangan berhubungan negatif dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, maka akan berdampak pada ketahanan pangan.

Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, menunjukkan tingkat kerawanan pangan yang tinggi (Badan Pangan Nasional, 2022). Hal ini memiliki beberapa implikasi negatif, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Harga pangan yang tinggi menimbulkan proporsi pengeluaran pangan yang tinggi menyisakan sedikit ruang bagi

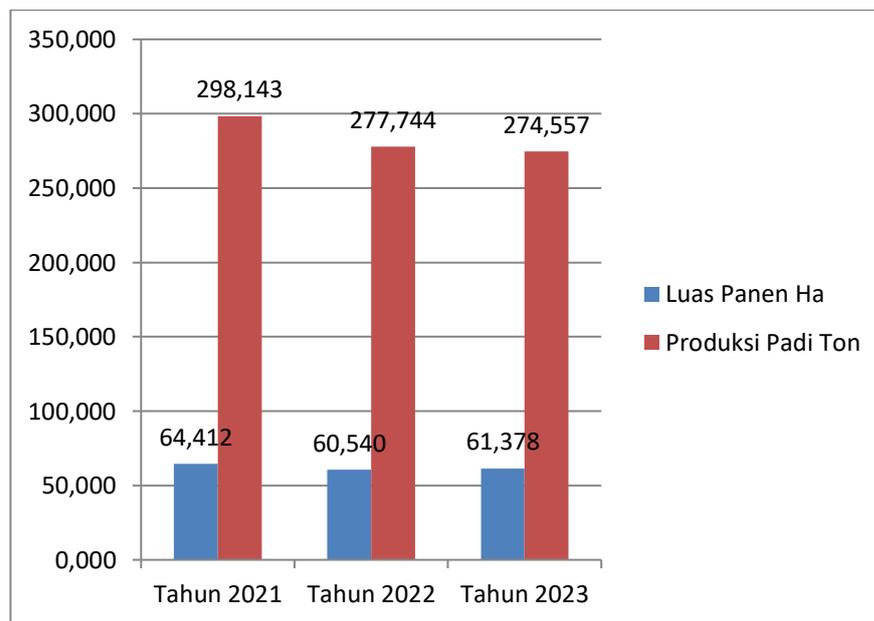
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dimana pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup menyebabkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan publikasi buku digital Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghasilkan dua jenis data statistik konsumsi dan pengeluaran penduduk provinsi jambi masyarakat; yaitu data terkait karakteristik sosial ekonomi penduduk dan data terkait konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Hasil Susenas Maret 2023 untuk wilayah Provinsi Jambi menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan mencapai 50,62 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Persentase pengeluaran yang lebih besar pada kelompok makanan terjadi pada seluruh golongan pengeluaran, bagi sebagian masyarakat akan menimbulkan permasalahan ekonomi (BPS, 2023).

Peningkatan aspek ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi yang juga dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan, mengingat lebih dari 70% pendapatan masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi pangan dan lebih dari 20% digunakan untuk konsumsi beras atau bahan makanan pokok (Badan Pangan Nasional, 2024).

Melihat ini penting untuk mengkaji permasalahan ketahanan pangan sebagai tugas pemerintah. Bahwa produksi komoditas padi Provinsi Jambi memiliki angka penurunan yang sangat signifikan dengan luas lahan sebagai mana yang terjadi pada Tabel berikut :

Tabel 1. 1 Tabel Produksi dan Panen



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Tabel 1. 2 Produksi Menurut Jenis Komoditas Pangan di Provinsi Jambi (Ton) Tahun 2018-2022.

Jenis Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	500.021	309.933	375.376	298.149	289.277
Beras	287.756	178.364	215.451	172.472	167.339
Palawija					
Jagung	106.619	51.712	60.085	39.322	-
Ubi Kayu	49.517	54.704	58.282	49.714	-
Ubi Jalar	29.242	61.984	61.984	50.623	-

Sayuran					
Bawang Merah	10.058	9.686	11.977	13.135	16.017
Bawang Putih	41	395	471	127	13
Cabai Rawit	8.272	9.880	13.588	11.307	12.437
Cabai Besar	38.003	42.698	47.133	15.881	4.471
Cabai Keriting	39.924	-	-	43.500	93.664
Tomat	11.621	12.348	19.652	23.731	48.008
Terung	10.831	10.003	11.970	14.827	16.383
Wortel	2.603	3.892	6.331	6.754	10.924
Kangkung	6.603	5.014	4.167	4.195	5.314
Bayam	4.644	3.834	2.861	3.157	16.017
Buncis	3.491	4.480	5.267	4.285	5.598
Kacang Panjang	8.697	7.959	8.208	7.491	8.163
Jamur	1.742	1.651	1.742	252	91
Buah-Buahan					
Melon	644	1001	7754	462	867
Semangka	3.662	5.762	6.069	4.877	5.846
Straoberi	1	-	-	9	12

Sumber :Jambi dalam angka (data diolah), 2023

Berdasarkan tabel diatas juga, pada Tahun 2018-2022 produksi tertinggi dari semua jenis komoditas pangan di Provinsi Jambi yaitu produksi padi. Produksi tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 500.021 Ton dan Produksi terendah Tahun 2021 sebesar 298.149. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan bahkan tidak

terjadi produksi yaitu produksi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar di Provinsi Jambi. Penurunan produksi juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tercatat pada Tahun 2022, kemudian juga terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain di lihat dari menurunnya petani untuk bercocok tanam (Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi,2022.)

Tabel 1. 3 Produksi Daging, Telur dan Susu Berdasarkan Jenis Ternak dan Unggas (Ton) di Provinsi Jambi (Ton) Tahun 2018-2022.

Jenis Ternak dan Unggas	2018	2019	2020	2021	2022
Sapi	4.540	4.702	5.094	5.571	5.760
Kerbau	1.484	1.602	1.833	1.747	1.784
Kambing	1.294	1.125	984	996	654
Domba	118	142	161	155	119
Ayam Pedaging	14.548	14.931	37.684	48.546	50.428
Ayam Kampung	7.665	8.040	7.590	9.662	8.023
Ayam Petelur	2.023	2.005	1.386	736	2.269
Itik	718	672	531	503	504
Telur Ayam Kampung	7.642	8.177	6.105	13.246	13.965
Telur Ayam Petelur	4.933	5.561	42	42.392	69.079
Susu (Sapi Perah)	9	9	8	4	4

Sumber : Jambi dalam angka (Data diolah),2023

Kemudian pada tabel diatas bahwa produksi daging dan telur (Ton) untuk jenis ternak dan unggas di Provinsi Jambi terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba, ayam pedaging, ayam kampung, ayam petelurn itik, telur ayam

kampung, telur ayam petelur sedangkan mengalami penurunan produksi. Produksi daging ternak yaitu sapi, kerbau dan kambing pada Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena peningkatan populasi ayam kampung sebesar 12.799.855 ekor, populasi ayam bertelur sebesar 4.698.334 ekor dan itik sebesar 651.613 ekor pada Tahun 2022 (Badan Pusat Statistik,2022).

Selain itu Pada Mei 2024, Menurut data (BPS) Provinsi Jambi mengalami inflasi secara year on year (y-on-y) sebesar 3,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,02. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 4,74 persen dengan IHK sebesar 108,41 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,22 persen dengan IHK sebesar 106,66. Kelompok pengeluaran terbesar penyebab Inflasi secara y-on-y diantaranya adalah: kelompok Makanan sebesar 8,53 persen. Dilansir dari badan pusat statistik provinsi jambi kelompok makanan sering mengalami inflasi bulanan wilayah tersebut.

Selanjutnya, Sesuai dengan data perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah Provinsi Jambi menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan komoditas padi adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Produktivitas padi Kabupaten Muaro Jambi sebesar 38 Kwintal/Ha sedangkan jumlah penduduk sebesar 407 Ribu, produktivitas padi Kabupaten Muaro Bungo sebesar 36 Kwintal/Ha sedangkan jumlah penduduk sebesar 367 Ribu dan produktivitas Kota Jambi sebesar 38 Kwintal/Ha sedangkan jumlah penduduk sebesar 612 Ribu. Penjelasan tersebut yang dilihat perbandingan produktivitas padi dan jumlah penduduk yang memiliki *gap* yang cukup tinggi,

sehingga wilayah tersebut harus mengimpor pangan berupa komoditas padi dari wilayah lain. Meskipun demikian, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi juga harus mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan melalui program atau kegiatan yang sesuai.

Pendekatan *Collaborative Planning* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat untuk hasil yang optimal dari sebuah kebijakan. Hal ini, tentunya membuat Lembaga lintas sektoral harus mampu melakukan strategi dalam mengatasi masalah pangan secara holistic, yang melibatkan Bappeda Provinsi Jambi sebagai Lembaga yang merencanakan upaya, strategi dan komitmen pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi sebagai tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dimana, melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di tingkat Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi tahun 2025 Komisi II DPRD Provinsi Jambi dan Kabid Bappeda Provinsi Jambi melakukan penyediaan lahan dan pengelolaan kawasan pangan komoditas penyumbang inflasi untuk masing-masing kabupaten/Kota dan melakukan rencana aksi koordinator masing-masing bidang dalam tim percepatan dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dalam percepatan ini diharapkan Kabupaten/Kota Menyiapkan Lahan Abadi untuk komoditas horti sebagai lokasi awal Kawasan penenganan inflasi dan diharapkan dalam bentuk hamparan yang tidak terpisah (BSIP, 2024). Setiap daerah Kabupaten/Kota

beserta stakeholder dapat bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini di daerah masing-masing. Akan tetapi lahan sawah produktivitas di Provinsi Jambi semakin menurun, disebabkan banyaknya alih fungsi lahan petani ke sektor perkebunan sawit sebesar 61.119 hektare (Fardaniah, 2024). Esensial lahan sebagai fasilitas pertanian mengalami penurunan yang sangat signifikan, penyusutan jumlah lahan pertanian dapat menjadi masalah dalam menstabilkan ketahanan pangan.

Upaya pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan oleh berbagai pihak, Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) melalui kegiatan bersama Pemerintah Daerah dan berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 69,50 di tahun 2022 menjadi 72,17 di tahun 2023 yang ditandai dengan penurunan jumlah kecamatan rentan rawan pangan dari awalnya 7 kecamatan menjadi 4 kecamatan (Badan Pangan Nasional, 2024). Namun, hingga saat ini upaya dan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi masih perlu dilakukan. Data dan hasil analisis terhadap permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Jambi memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti ini membantu sektor pemerintah yang bersangkutan dalam menentukan prioritas dan merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh akademisi. Hasil penelusuran terhadap peneliti sebelumnya telah memungkinkan penulis menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sangat bermanfaat

untuk menghindari objek penelitian yang mirip dan dapat menentukan di mana penelitian sebelumnya berbeda. Dengan demikian, penulis menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Penelitian pertama tentang pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis masih bergantung pada impor. Selain itu, masih rendahnya adopsi teknologi yang dilakukan untuk strategi ketahanan pangan. Hasil penelitiannya yaitu terdapat masalah adopsi teknologi pertanian menghambat produktivitas, disebabkan oleh rendahnya transfer teknologi dari lembaga pertanian kepada petani (Chaireni et al., 2020).

Penelitian kedua dengan hasil temuan beberapa faktor, seperti karakteristik rumah tangga, pendapatan, pengetahuan, dan selera terhadap pangan lokal, memengaruhi penerapan diversifikasi konsumsi pangan lokal dalam menu keluarga di Kota Tasikmalaya, Hasil temuan adalah hanya sekitar 73,50% ton beras terpenuhi secara lokal sementara sisanya harus dibawa dari luar (Heryadi et al., 2024).

Penelitian ketiga berfokus pada peran perumda pasar jaya dalam memenuhi kebutuhan pangan di DKI Jakarta menggunakan analisis SWOT mengevaluasi situasi yang dihadapi oleh perumda pasar jaya dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta sangat penting untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat (Nasrudin & Runturambi, 2022).

Penelitian keempat menunjukkan pola permintaan pangan akan berubah sebagai akibat dari peningkatan proporsi penduduk kota. Kualitas konsumsi makanan masyarakat masih belum memenuhi rekomendasi, disebabkan oleh hambatan dalam distribusi; daya beli masyarakat yang rendah; dan kurangnya pemahaman tentang pola makan yang sehat. Pembangunan ketahanan pangan yang lebih terarah, termasuk produksi pangan yang beragam berkelanjutan dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya harus menjadi rekomendasi kebijakan (Suryana, 2014).

Penelitian kelima dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatra Barat harus diidentifikasi dan diatasi. Sebuah strategi yang berhasil untuk membangun ketahanan pangan adalah kolaborasi pentahelix, yang melibatkan sektor pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media. Untuk mengatasi tantangan saat ini dan mendukung pertahanan negara, pemangku kepentingan harus bekerja sama lebih (Safardan et al., 2023).

Penelitian keenam ini menganalisis indeks ketahanan pangan global (GFSI) Finlandia, ketergantungan Finlandia pada impor pangan, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan di masa depan. Meskipun memiliki peringkat tinggi dalam ketahanan pangan global, ketergantungan ini menyebabkan fluktuasi menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan sistem pangan domestik.. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan sistemik dalam membangun ketahanan pangan yang kuat, terutama menghadapi perubahan lingkungan global dan pertumbuhan populasi (Fernandes & Samputra, n.d.).

Penelitian ketujuh mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan ditingkat rumah tangga tani, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga variable yang berpengaruh secara parsial terhadap pengeluaran seperti : tingkat pendapatan, harga beras dan pengetahuan gizi oleh ibu rumah tangga (Saputro & Fidayanti, 2020).

Penelitian kedelapan membahas memperkuat ketahanan pangan melalui pengurangan pemborosan pangan lebih. Dengan hasil temuan yaitu kehilangan dan pemborosan pangan terbesar terjadi pada kelompok pangan dari buah dan sayuran mencapai 63,3%. Kelompok pangan umbi-umbian dan ikan juga memiliki angka kehilangan yang tinggi masing-masing 40,1% dan 57,0%. Sedangkan pemborosan pangan tertinggi pada kelompok buah, sayuran dan ikan (Kariyasa & Suryana, 2012).

Penelitian kesembilan temuan ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Klaten, terutama di sektor industri, perdagangan dan properti telah menyebabkan meluasnya ahli fungsi lahan pertanian. Hal ini berdampak negative terhadap ketersediaan lahan pertanian yang tidak luas. Penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2P melalui peraturan daerah diharapkan dapat mengurangi laju konversi lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan semakin terancam (Muryono & Utami, 2020).

Penelitian terakhir membahas tentang krisis pangan yang dihadapi masyarakat terhadap perekonomian yang memiliki fokus pada ketahanan

pangan dikawasan ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan). Bahwa perdagangan intraregional dan keterbukaan perdagangan berpengaruh kepada peningkatan ketahanan pangan melalui memperluas kegiatan produksi. Pentingnya ASEAN mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan dengan tujuan sama yaitu dinamis dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, Melalui mekanisme ketahanan nasional dan regional yang kuat (Yudhatama et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti prespektif baru kajian tentang ketahanan pangan khususnya di Provinsi Jambi yang berfokus untuk melihat proses *collaborative planning* serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam perencanaan terdapat banyak pendekatan yang dilakukan semata-mata agar rencana yang telah tersusun dapat diterapkan dikalangan masyarakat. Melalui Kolaborasi bekerja sama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri yang akhirnya menimbulkan regulasi dalam upaya perencanaan menciptakan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul **“UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI MELALUI COLLABORATIVE PLANNING PRESPEKTIF”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ketahanan Pangan merupakan salah satu permasalahan yang selalu dipertanyakan masyarakat. Kenaikan harga bahan pangan di Provinsi Jambi merupakan permasalahan yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Diperlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh bagi masyarakat Jambi.

1. Bagaimana proses *collaborative planning* yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menciptakan Ketahanan Pangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana *Collaborative Planning* sejalan dengan prespektif bersama pemangku kepentingan berperan penting dalam menjembatani perencanaan menciptakan ketahanan pangan masyarakat Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Mengidentifikasi *Collaborative Planning* yang dilakukan pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD) bersama koordinasi jalannya perencanaan dan masyarakat dalam melihat permasalahan ketahanan pangan, dan memberikan regulasi yang tepat untuk menciptakan ketahanan pangan secara berkelanjutan, yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menanggapi persoalan ketahanan pangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu Instansi Pemerintah di Provinsi Jambi untuk memperbaiki kinerja mereka dalam membuat regulasi terkait ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Hasil penelitian dapat membantu Pemerintah melakukan pengembangan strategi yang digunakan. Penelitian ini dapat memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan goals dalam mengupayakan ketahanan pangan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Jambi.

1.5 Landasan Teori

Konsep teori akan memberikan panduan dan arahan bagi peneliti untuk menganalisis topik yang diangkat serta membantu dalam menemukan sumber masalah di lapangan. Beberapa teori akan menjelaskan indikator dan melakukan identifikasi serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan takaran variable topik penelitian. Teori-teori berikut digunakan oleh peneliti sebagai referensi penelitian :

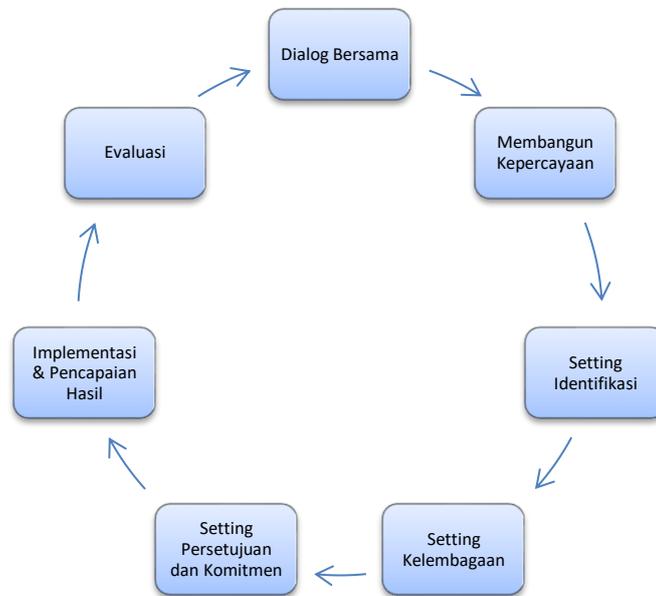
1.5.1 *Collaborative Planning*

Perencanaan kolaboratif (*Collaborative Planning*) adalah proses pembuatan keputusan berbagai pemangku kepentingan, yang melihat permasalahan dari berbagai sudut, bermusyawarah untuk mencari perbedaan sudut pandang secara konstruktif kemudian mencari solusi atas sebuah permasalahan. *Collaborative Planning* merupakan sebuah jalan panjang (proses) pembuatan keputusan dimana melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat melihat permasalahan secara kompleks, bekerjasama untuk menggali potensi dan

perbedaan secara konstruktif, selanjutnya menyepakati alternatif-alternatif solusi, dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih daripada mencari solusi masing-masing. Pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan berbagai perspektif dipertimbangkan dan konsensus tercapai Fokus utamanya adalah inklusivitas, membangun konsensus, dan memberdayakan para pemangku kepentingan agar memiliki peran langsung dalam membentuk hasil yang mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial masyarakat.

Peran perencana dalam proses perencanaan kolaboratif adalah untuk menjembati antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah serta sebaliknya. Seorang perencana dalam perencanaan kolaboratif tidak hanya sebagai fasilitator dan mobilisator namun juga sebagai mediator. Perencana harus mampu memahami dan memediasi konflik yang mungkin terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Proses dalam perencanaan kolaboratif membutuhkan adanya *leadership* yang *fleksibel* atau mampu menyesuaikan diri namun tetap memiliki ketegasan, Dimana proses perencanaan yang efektif tidak hanya bergantung pada keputusan yang diambil oleh para ahli atau pejabat pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya Proses *Collaborative Planning* menurut (Pratiwi Yulia, 2014) meliputi :

Gambar 1. 1 Proposisi Proses Perencanaan Kolaboratif



Sumber : Proses *Collaborative Planning* menurut (Pratiwi Yulia, 2014).

1. Proses Dialog, Proses awal perencanaan kolaboratif penting dibangun dengan melakukan pertemuan dan tatap muka dialog bersama. Proses dialog antar *stakeholder* untuk dapat melakukan dialogs secara langsung dan mencegah adanya hambatan dalam komunikasi dapat mengenal satu sama lain.
2. Membangun Kepercayaan, Setelah adanya dialog bersama *stakeholder* saling mengenal satu dengan yang lain maka proses selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara pihak yang melakukan kerjasama. Dengan adanya kepercayaan yang kuat maka antarpelaku dapat melakukan kerja sama satu sama lain.
3. Setting Identifikasi, dalam proses ini terjadi kegiatan yang memastikan bahwa kebijakan atau program berjalan, Dalam proses ini terjadi proses identifikasi potensi dan masalah yang dibahas secara

bersama-sama antarpelaku kepentingan dan *stakeholder*.

4. Setting Kelembagaan, Merupakan sebuah komponen yang penting dalam suatu wilayah, di samping itu mempunyai fungsi ataupun perana dan tugas yang terstruktur dalam organisasi instansi tersebut dan merupakan agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat atau diprakarsi oleh pemerintah/*stakeholder* terkait. Lebih dari itu dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan.
5. Setting Persetujuan dan Komitmen, Dalam konteks perencanaan kolaboratif, proses persetujuan dan komitmen merujuk pada tahapan di mana semua pihak yang terlibat dalam perencanaan bersama menyetujui rencana atau keputusan tertentu, dan kemudian berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya dalam perencanaan dan implementasi proyek atau inisiatif.
6. Implementasi dan Pencapaian Hasil, Proses ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah dibuat secara bersama-sama. Proses implementasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua *stakeholder*. Pada proses ini terjadi pencapaian hasil dari rencana-rencana yang sudah dibuat.
7. Evaluasi, Proses ini dilakukan dari tahap setting identifikasi hingga implementasi. Hasil evaluasi mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses *collaborative planning* dimana melihat apakah ada kendala-kendala yang menunjukkan hasil perbaikan atau

tidak, sampai tujuan bersama dapat dicapai : Kinerja; Efektivitas program dan; Dampak dari kegiatan atau program tertentu.

1.5.2 Ketahanan Pangan

a) Pengertian Ketahanan Pangan

Definisi Ketahanan Pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan terpenuhi dari tingkat negara hingga individu, yang terlihat dari ketersediaan pangan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pangan tersebut harus aman, beragam, merata, dan dapat diakses oleh semua orang kapan saja, sehingga mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Sedangkan teori yang dikemukakan Ketahanan Pangan kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna yang tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses hak atas pangan melalui pembelian (Oxfam, 2001).

Maxwell dan Frankenberger (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses yang cukup terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat mereka. Definisi ini menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan ketersediaan pangan secara fisik, tetapi juga mencakup aksesibilitas yang berkelanjutan bagi individu untuk memperoleh makanan yang cukup dan bergizi (Maxwell & Frankenberger, 1992).

b) Jenis-Jenis Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah konsep yang melibatkan berbagai aspek penting guna

menjamin bahwa setiap individu dapat memperoleh makanan yang memadai, aman dan bernutrisi. Berbagai pakar serta lembaga internasional telah mengklasifikasikan beberapa dimensi utama dalam ketahanan pangan, diantaranya :

- 1) Ketersediaan (*Availability*), Mengacu pada keberadaan dan jumlah pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi suatu populasi. Ini mencakup produksi pangan domestik, impor, cadangan pangan, serta distribusi yang efisien ke berbagai wilayah. Ketersediaan pangan adalah salah satu pilar utama dalam konsep ketahanan pangan.
- 2) Akses (*Access*), Mengacu pada kapasitas individu atau keluarga untuk secara berkelanjutan mendapatkan makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan finansial untuk membeli makanan, aksesibilitas dari segi lokasi dan sistem distribusi, serta faktor sosial dan budaya seperti kebiasaan makan dan dukungan masyarakat yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
- 3) Stabilitas (*Stability*), Melibatkan upaya untuk memastikan bahwa ketersediaan dan akses terhadap pangan tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Selain itu, stabilitas pangan juga harus memperhatikan dampak krisis ekonomi, seperti inflasi atau resesi, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu rantai pasokan pangan. Dengan membangun sistem pangan yang kuat dan responsif, kita dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan dan tantangan yang tidak terduga, sehingga memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi semua.

- 4) Pemanfaatan Pangan (*Food Utilization*), Pemanfaatan pangan (*Food Utilization*) mengacu pada cara individu atau rumah tangga mengolah dan mengonsumsi pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi, melibatkan proses penyimpanan, pengolahan, serta kondisi kesehatan yang mempengaruhi penyerapan nutrisi. Menurut FAO (2008), hal ini berhubungan dengan cara tubuh mengonsumsi dan memanfaatkan pangan untuk memperoleh energi dan nutrisi yang diperlukan demi kehidupan yang sehat dan aktif.

Selain keempat dimensi tersebut, beberapa lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) menambahkan dua dimensi lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketahanan pangan yaitu :

- 1) Keamanan Pangan (*Food Safety*), Menurut WHO (2020), keamanan pangan mengacu pada keadaan di mana makanan tidak mengandung bahaya yang dapat menimbulkan penyakit jika dikonsumsi, baik yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba, bahan kimia, maupun benda fisik yang berbahaya.
- 2) Kualitas Gizi (*Nutritional Quality*), FAO (2014) mendefinisikan kualitas gizi sebagai jumlah nutrisi dalam makanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi tubuh, sehingga konsumsi makanan tersebut berperan dalam mempertahankan kesehatan yang optimal.

c) Penyebab Ketahanan Pangan Terganggu

Kerawanan pangan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi untuk hidup sehat. Penyebab kerawanan pangan sangat kompleks dimana melibatkan berbagai faktor, seperti :

1) Faktor Ekonomi

- Pendapatan Rumah Tangga, Pendapatan rendah membatasi kemampuan membeli pangan yang bergizi.
- Fluktuasi Harga Pangan, Perubahan harga pangan yang tidak stabil dapat mengurangi akses bagi rumah tangga dengan penghasilan rendah tidak sebanding dengan pengeluaran.

2) Faktor Sosial dan Budaya

- Pendidikan dan Pengetahuan Gizi, Kurangnya pengetahuan tentang gizi mempengaruhi pilihan dan cara mengolah makanan sehat.
- Praktik Pemberian Makanan, Kebiasaan budaya dalam makanan dapat mempengaruhi gizi, contoh : masyarakat memilih komoditas pangan yang dianggap enak namun minim gizi baik.

3) Faktor Infrastruktur dan Akses

- Akses ke Layanan Kesehatan, Terbatasnya akses ke layanan kesehatan dapat menghambat penanganan masalah gizi.
- Ketersediaan Pangan, Infrastruktur distribusi pangan yang kurang baik dapat menghalangi akses ke pangan bergizi.
- Keterbatasan Infrastruktur Pertanian dan Akses terhadap Teknologi Pertanian, kurangnya infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas menghambat efisiensi produksi dan distribusi pangan.

4) Faktor Lingkungan dan Bencana Alam

- Perubahan Iklim dan Bencana Alam, Perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan.

5) Faktor Kebijakan

- Alih Fungsi Lahan Pertanian, Konversi lahan pertanian menjadi area non-pertanian mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan lokal.
- Fluktuasi Harga Pangan, Perubahan harga yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sementara wilayah masih rentan terhadap kerawanan pangan.

d) Dampak Ketahanan Pangan Terganggu

Ketahanan pangan yang terganggu sangat berdampak pada kehidupan sosial dan negara, dimana jika terganggunya ketahanan pangan maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan negara akan ikut menurun. Beberapa dampak pengangguran, yaitu sebagai berikut :

1) Ditinjau dari segi Sosial dan Ekonomi

Gangguan dalam ketahanan pangan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan, meicu ketegangan dalam masyarakat, serta menambah beban ekonomi melalui meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan program bantuan sosial.

2) Ditinjau dari segi Kesehatan

Terhambatnya akses terhadap pangan yang bergizi dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti malnutrisi, stunting pada anak, serta meningkatkan

risiko penyakit kronis akibat asupan nutrisi yang kurang memadai.

3) Ditinjau dari segi Politik

Ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh masyarakat dapat memicu konflik dan instabilitas politik, terutama di daerah dengan distribusi pangan yang tidak merata.

1.6 Definisi Konseptual

Konseptual merupakan alat yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan memahami definisi dan fungsi dari sebuah teori, kita dapat melakukan penelitian dengan baik sehingga menghasilkan temuan yang lebih bermakna. Maka dari itu, definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan merupakan keadaan dimana dalam sebuah daerah tahan pangan termasuk dalam akses distribusi, stabilitas harga pangan, keamanan pangan dan ketersediaan pangan. Selain itu masalah yang terjadi dari ketahanan pangan yaitu kerawanan pangan dimana masalah tersebut menyebabkan masalah sosial lainnya. Maka dari itu, diperlukan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional membantu peneliti dalam memastikan penelitian yang dilakukan apakah telah berjalan secara sistematis, terstruktur, serta memberikan peta yang jelas bagi peneliti hingga akhir penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan teori *Collaborative Planning* oleh (Pratiwi Yulia, 2014), dengan beberapa indikator yang meliputi :

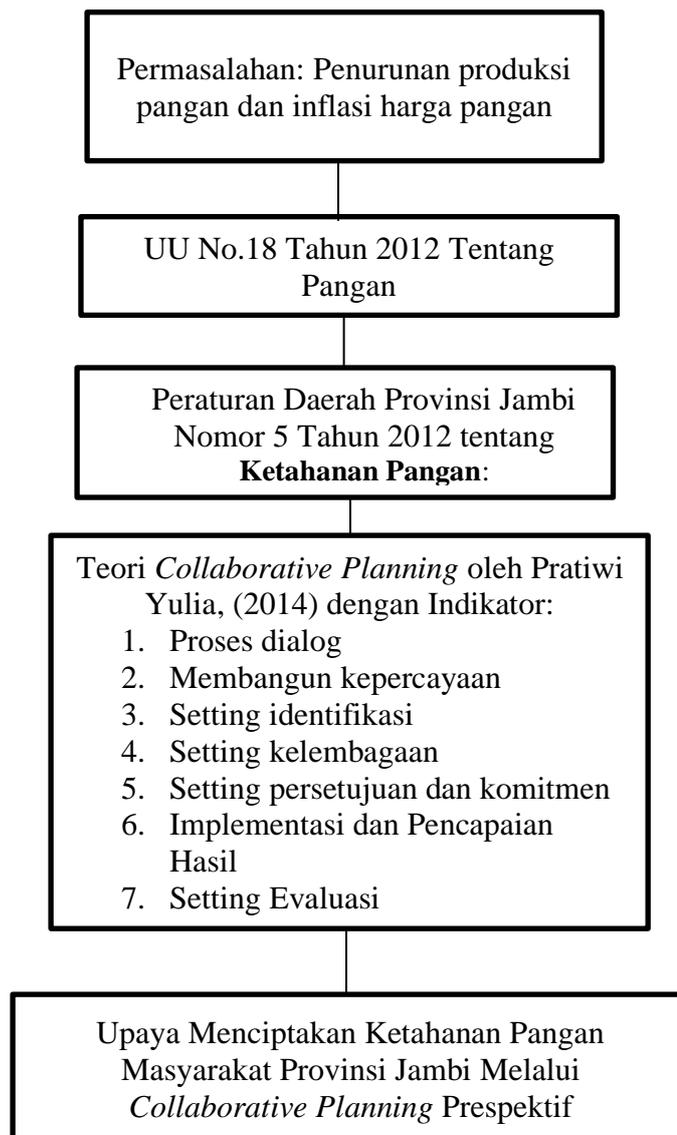
1. Proses Dialog, merupakan langkah pertama yang dibangun dalam proses perencanaan kolaborasi, untuk dapat mencegah adanya hambatan dalam komunikasi.
2. Membangun Kepercayaan, dengan komunikasi dialog bersama terus-menerus maka muncul kepercayaan guna menguatkan rasa antar pemangku kepentingan agar pelaku dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengupayakan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
3. Setting Identifikasi, dalam proses ini terjadi kegiatan *stakeholder* yang terlibat dalam pembahasan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, untuk menentukan indentifikasi potensi dan masalah yang dibahas bersama untuk membuat perencanaan secara kolaboratif.
4. Setting Kelembagaan, dimana lembaga sebuah komponen penting dalam suatu daerah pemerintahan, mempunyai fungsi sebagai agen sosialisasi terencana diprakarsi oleh pemerintah atau *stakeholder* yang memiliki peran dan tupoksi masing-masing dalam mengupayakan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
5. Setting Persetujuan dan Komitmen, dalam perencanaan kolaboratif merujuk pada tahapan dimana semua pihak yang terkait menyetujui penyampaian argumentasi dari diskusi secara bersama-sama dan berkomitmen untuk mengimplementasikan upaya ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
6. Implementasi dan Pencapaian Hasil, Proses ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah dibuat secara bersama-

sama. Proses implementasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder. Pada proses ini terjadi pencapaian hasil dari rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya.

7. Evaluasi, berkaitan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses *collaborative planning* dalam sebuah masalah ketahanan pangan, dimana menunjukkan hasil atau tidak, sampai tujuan bersama tercapai.

1.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat teori, fakta dari penelitian, observasi yang dilakukan, dan kajian pustaka yang menjadi dasar penyusunan penelitian.



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, ketahanan pangan di Provinsi Jambi menjadi isu yang harus terus dibahas, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2012, Tentang Pangan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012, tentang mengatur Ketahanan Pangan pemerintah berkewajiban untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam ketahanan pangan dengan merencanakan berbagai kebijakan, startegi, dan melaksanakan program yang dapat membantu. Kemudian, penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menciptakan ketahanan pangan, menggunakan Teori *Collaborative Planning* oleh Yulia, (2014).

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya diartikan sebagai suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan tetentu.

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah digunakan untuk mendapatksn data dengan tujuan atau kegunaan tertentu lainnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif didefenisikan oleh Creswell, J. W.,. Dalam buku Feny (2022) sebagai penelitian dengan melihat masalah-masalah sosial dan manusia. Di sini, peneliti akan memberikan deskripsi mendalam tentang temuan penelitian dalam laporan penelitian dan akan didasarkan pada laporan tampilan data serta analisis data yang dikumpulkan di lapangan.

Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dengan tujuan utama memperoleh pemahaman mendalam tentang makna suatu fenomena, bukan untuk melakukan generalisasi. Peneliti lebih bersifat explanation (menjelaskan) untuk mempelajari masyarakat objek Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi dari topik penelitian melalui survei wawancara terstruktur, tes secara langsung, dan observasi agar memperoleh data yang bersifat alamiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan di tempat alamiah, dengan sumber data diperoleh secara langsung, bukan opini peneliti. Data diperoleh dituangkan dengan memberikan penjelasan atau penggambaran mengenai situasi maupun kondisi yang diteliti ke bentuk uraian naratif, Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah agar gambaran dilapangkan, kemudian di deskripsikan ke bentuk narasi yang jelas.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian studi ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi dan beberapa instansi pemerintah setempat. Secara rinci, lokasi penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi, Petani lokal Provinsi Jambi dan Masyarakat Provinsi Jambi. Lokasi tersebut dipilih karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Serikat Petani Jambi, Peternak lokal Provinsi Jambi dan Masyarakat Provinsi Jambi merupakan

fasilitator dan pengimplementasian upaya ketahanan pangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, menjadi lokasi utama dalam penelitian ini oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif dan akurat, berdasarkan data dan fakta terkait permasalahan yang dikaji.

1.9.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Pemerintahan Provinsi Jambi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang relevan dan kontekstual tentang *collaborative planning* dalam konteks menciptakan ketahanan pangan yang mendapat informasi dari stakeholder berperan dalam perencanaan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengupayakan ketahanan pangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan bagaimana kontribusi penting pelaksanaan perencanaan kolaboratif tersebut.

1.9.4 Sumber data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Bentuk dari data kualitatif diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu : wawancara mendalam dan dokumentasi Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah melalui wawancara bersama pihak-pihak terkait yang dapat memberikan data, informasi, ataupun jawaban yang jelas. Pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, antara lain: Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi, Petani lokal Provinsi Jambi dan Masyarakat Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan oleh peneliti dalam penelitian mereka. Pada Penelitian ini data sekunder dapat mencakup informasi yang telah dikumpulkan seperti peraturan, berita, artikel dan jurnal. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dimana membahas Ketahanan Pangan sebagai pembangunan berkelanjutan.

1.9.5 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat tentang bagaimana bentuk kolaborasi perencanaan dalam isu ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Teknik *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini efektif untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang diperoleh memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk memberikan informasi yang mendalam dan akurat tentang permasalahan dalam menciptakan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Kemudian, *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memilih partisipan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini ibarat bola salju yang menggelinding, di

mana peneliti memulai dengan sedikit partisipan awal dan kemudian meminta mereka merujuk orang lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Proses ini diulang hingga sampel yang cukup diperoleh.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menganalisis masalah, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dilakukan antara dua orang, yaitu orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab langsung dengan orang yang diwawancarai atau mendengarkan langsung tentang topik yang dibicarakan.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Berikut beberapa narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 1. 4 Informan

NO.	Narasumber
1.	Kepala Sub Bidang PSDA I/ Ketua Sekretariat SNPMU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi.
2.	Plt Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi.
4.	Kepala DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi
5.	Peternak lokal Jambi
6.	Masyarakat Provinsi Jambi

Sumber: Dikelola oleh Penulis

2. Dokumentasi

Merupakan proses mencari data sumber berupa tulisan, gambar, catatan, dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan tertulis dan dokumen serta mempelajari secara menyeluruh tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

Penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu ketahanan pangan, Seperti rencana strategis yang sudah dilakukan dan permasalahan apa yang melandasi. Serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektifitas program dalam permasalahan menciptakan ketahanan pangan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Dokumen seperti foto juga dapat digunakan untuk memastikan data.

1.9.7 Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu kepada metode ataupun cara yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memaknai data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi bermakna dari data tersebut dan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Teknik analisis data kualitatif melibatkan proses yang sistematis dalam mengorganisasikan, memodifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data non-numerik untuk membangun pemaknaan, pola, atau tema yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman :

1. Reduksi Data

Merujuk pada langkah-langkah seperti pemilihan, fokus, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang terdapat dalam catatan tertulis lapangan (Yusuf, 2014). Oleh karena itu, proses reduksi data akan berlangsung selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Karena volume data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dapat cukup besar, penting untuk mencatat dengan teliti dan detail. Dalam melakukan reduksi data, langkah-langkah akan dipandu oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses produksi data juga melibatkan pemikiran kritis yang memerlukan kecerdasan dan pemahaman yang mendalam.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya dalam penelitian adalah menyajikan data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat disampaikan dalam berbagai format seperti table, grafik, diagram alir, pictogram dan lain sebagainya. Dengan cara ini, data menjadi terstruktur dan tersusun dalam pola hubungan yang mempermudah pemahaman.

Penyajian data merupakan sebuah kegiatan dalam menyusun informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Di samping itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui ringkasan, diagram, hubungan antara kategori, diagram alir, dan sebagainya, namun format yang umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif, seperti dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap pengumpulan data, penelusuran data, interpretasi benda-benda, pencatatan pola yang teratur, penjelasan dan mengikuti urutan sebab-akibat (Rijali, 2019). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya belum

terlukis dengan jelas, namun menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian.

1.9.8 Keabsahan Data

Keabsahan atau triangulasi data merupakan konsep krusial yang dipengaruhi oleh konsep validitas dan reliabilitas. Ini berdasarkan pada prinsip-prinsip positivisme dan selaras dengan kesenjangan pengetahuan, kriteria, serta paradigma penelitian kualitatif itu sendiri. Dimana, penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang konsisten dengan fenomena yang diamati melalui penggunaan empat prinsip, yaitu reliabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan kredibilitas. Hal ini dilakukan untuk memahami tingkat kepercayaan data yang dapat diperoleh dari suatu penelitian tertentu serta untuk memahami hasil penelitian dengan melihat bagaimana penelitian tersebut dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

Pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data yang menganalisis informasi dengan berbagai metode dan sumber data, seperti wawancara dan observasi. Selain ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, pertanyaan tertutup, catatan terstruktur dan tidak terstruktur, jurnal ilmiah, catatan pribadi, dan gambar. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan tersebut akan menghasilkan informasi atau data yang berbeda, kemudian akan memberikan perspektif yang berbeda tentang fenomena yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data, dimana

dilakukan menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2022). Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terdapat tipe triangulasi :

- 1) Triangulasi sumber, Untuk menguji kredibilitas, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diperiksa. Data tersebut kemudian dijelaskan dan dikelompokkan sesuai dengan informasi yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Peneliti akan mengidentifikasi data yang memiliki kesamaan serta perbedaan, lalu menganalisisnya secara lebih mendalam.
- 2) Triangulasi teknik, Pengujian dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan metode berbeda. Seperti wawancara atau analisis dokumen, jika ada perbedaan hasil, peneliti akan mengonfirmasi data tersebut kepada sumber melalui observasi untuk memastikan keakuratannya.
- 3) Triangulasi waktu, melibatkan perbandingan informasi yang diberikan oleh narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dan pertemuan berikutnya, yang mungkin menunjukkan perbedaan. Untuk memastikan data yang lebih kredibel, penting untuk melakukan pengecekan secara berulang.